

## Framing Moralistik Religius dalam Ceramah Pasca Banjir di Aceh: Analisis Pesan Kewarganegaraan

Julrissani<sup>1\*</sup>, Miptah Parid<sup>2</sup>, Safikri Taufiqurrahman<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama Cirebon, Indonesia

\*[jjulrissani@gmail.com](mailto:jjulrissani@gmail.com)

### Abstract

*The major floods that struck Aceh in late 2025 not only disrupted socio economic life but also generated competing explanations in the public sphere, particularly through mosque sermons, between ecological structural accounts and moralistic religious interpretations. This study examines how post flood Friday sermons frame the causes of the disaster in moral spiritual terms and assesses the implications for citizenship messages, especially ecological responsibility, participation in disaster mitigation, and environmental ethics. Employing a qualitative descriptive design, the study combines a focused literature review with document analysis of sermon texts and recordings, supported by thematic coding to map recurrent frames and proposed responses. The findings indicate the dominance of three frames Admonition, Trial, and Expiation which foreground repentance, patience, moral self-correction, and charitable giving as primary responses, while giving limited attention to disaster literacy, risk-reduction measures, watershed restoration, spatial-planning evaluation, and environmental policy accountability. As a result, sermons tend to construct the ideal citizen primarily as a morally obedient and philanthropic subject, rather than consistently as an ecological and policy oriented actor. The study concludes that religious discourse can become more transformative when integrated with accessible scientific explanations of hydrometeorological drivers and environmental degradation, thereby strengthening community preparedness, social monitoring of ecological harm, and advocacy for sustained disaster-risk governance.*

**Keywords:** Disaster Framing, Moralistic Religious Framing, Sermons, Disaster Risk, Ecological Citizenship

### Abstrak

Banjir besar yang melanda Aceh pada akhir 2025 tidak hanya mengganggu kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga memunculkan pertarungan penjelasan antara narasi ekologis-struktural dan narasi moralistik religius di ruang publik, terutama melalui mimbar masjid. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ceramah/khutbah pascabanjir meringkaskan sebab bencana dalam frame moral spiritual serta menilai implikasinya bagi pesan kewarganegaraan, khususnya pembentukan tanggung jawab ekologis, partisipasi mitigasi bencana, dan etika lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap teks/rekaman ceramah, dilengkapi pengodean tematik untuk memetakan pola frame dan rekomendasi tindakan. Hasil menunjukkan dominasi tipologi frame Teguran, Ujian, dan Kifarat yang menjadikan taubat, kesabaran, pembenahan akhlak, dan filantropi sebagai respons utama. Sementara literasi kebencanaan, pengurangan risiko, rehabilitasi DAS, evaluasi tata ruang, dan tuntutan akuntabilitas kebijakan lingkungan kurang ditonjolkan. Akibatnya, ceramah cenderung memproduksi warga ideal sebagai subjek moral, patuh, dan dermawan, namun belum konsisten sebagai subjek ekologis dan subjek kebijakan yang kritis. Disimpulkan

bahwa bahasa religius dapat menjadi lebih transformatif bila diintegrasikan dengan penjelasan ilmiah sederhana tentang faktor hidrometeorologi dan degradasi lingkungan, sehingga energi spiritual mendorong kesiapsiagaan komunitas, kontrol sosial terhadap perusakan alam, dan advokasi kebijakan pengurangan risiko bencana.

**Kata kunci:** Framing Bencana, Moralistik Religius, Ceramah/Khutbah, Kebencanaan, Kewarganegaraan Ekologis.

## **Pendahuluan**

Banjir besar melanda Aceh penutupan akhir tahun 2025 salah satu peristiwa hidrometeorologi yang paling besar terjadi setelah Tsunami Aceh 2004 silam yang mengganggu kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat dalam waktu singkat bahkan berkepanjangan hingga saat ini. Pemberitaan mencatat hujan deras sudah berlangsung sejak sekitar 18 November 2025, lalu memicu banjir di berbagai kabupaten/kota; pada 26-28 November 2025, dilaporkan sembilan daerah terdampak (antara lain Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Singkil, Gayo Lues, Aceh Selatan, dan Langsa) serta 1.497 jiwa mengungsi, dengan dampak rendaman yang disebut mencapai puluhan ribu rumah (Agus, 2025b). Selain korban terdampak, bencana ini juga memukul infrastruktur dasar rumah yang rusak, terbawa arus, tertimbun lumpur dan konektivitas antarwilayah terputus. Dalam rilis situasi bencana 28 November 2025, BNPB (Abdul Muhari, 2025) merinci kejadian banjir di beberapa kabupaten Aceh beserta dampaknya pada desa terdampak, lahan pertanian, jembatan, tanggul serta Dampak konektivitas juga tampak pada jalur nasional Banda Aceh–Medan akses jalan dan jembatan yang terputus.

Sejumlah laporan investigatif lingkungan juga menyebut bahwa banjir dan longsor di Aceh pada periode ini berkembang dinamis data korban dan pengungsi berubah seiring asesmen lapangan (Junaidi Hanafiah, 2025). Ruang publik Aceh pascabanjir, muncul penanda yang kuat, bukan hanya genangan, timbunan dan kerusakan hilangnya rumah serta desa, tetapi juga material kayu gelondongan bahkan ada juga yang masih terpotong rapi yang belum diangkut dengan petanda pada kayu yang ikut terbawa arus hal tersebut menjadi bahan pembicaraan warga serta media (Antara, 2025).

Penanda visual semacam ini membuat banjir tidak hanya dipahami sebagai peristiwa cuaca, tetapi juga memicu perdebatan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada hulu, DAS, dan tata kelola alam?. Namun, penjelasan ekologis-struktural ini berjumpa dengan penjelasan lain yang sama kuat di ruang sosial Aceh, yaitu penjelasan moralistik religius. Dalam pengamatan lapangan peneliti mengikuti shalat Jumat di beberapa masjid, sebagian ceramah/khutbah pascabanjir menarasikan bencana sebagai teguran akibat dosa, kelalaian ibadah, maraknya maksiat, atau kikir yang kemudian mendorong ajakan taubat, peningkatan kesalehan, dan kepatuhan moral. Di sini, bencana diposisikan sebagai peristiwa yang dimaknai terutama melalui relasi manusia dengan Tuhan ketimbang relasi manusia dengan lingkungan dan tata kelola. Apakah hal tersebut tepat sebagai

informasi dalam penyampaian pesan kewarganegaraan pasca banjir bagi warga Aceh?

Framing *moralistic religious* bukan hal baru di Aceh pembacaan moralistik atas bencana Tsunami masa lampau memiliki pijakan sosial budaya tertentu dan berpotensi muncul kembali pada bencana lainnya termasuk di bencana saat ini (Nazaruddin, 2024).

Agama perlu hadir menjelaskan dan meluruskan sebab akibat misalnya mengapa dapat terjadinya bencana, dari mana datangnya bencana dan apa saja yang harus kita pahami dari peristiwa banjir bandang yang terjadi di Aceh, pesan kewarganegaraan akan ikut hadir mencerdaskan umat melalui agama sangat di anjurkan (Amin Abdullah, 2014). Artikel ini bertujuan menganalisis framing moralistik religius dalam ceramah/khutbah pascabanjir Aceh 2025 serta implikasinya terhadap pesan kewarganegaraan, terutama dalam membangun kesadaran tanggung jawab ekologis dan partisipasi mitigasi bencana serta etika lingkungan.

### **Metode Penelitian**

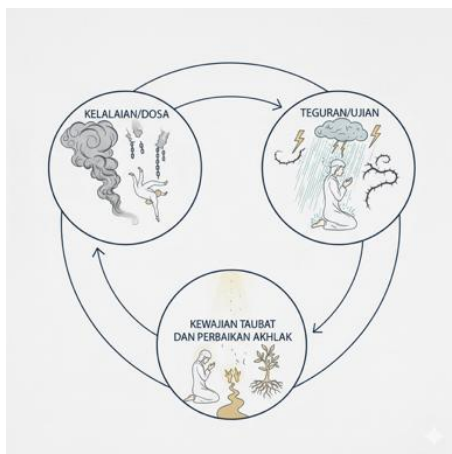
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menghasilkan uraian yang dekat dengan data. Secara singkat metode ini dapat dipahami sebagai suatu cara dalam menghasilkan data yang sifatnya deskriptif dengan memanfaatkan fenomena atau isu-isu kekinian yang sedang terjadi untuk dianalisis dalam rangka menghasilkan suatu temuan kompleks yang detail dan komprehensif. (Sandelowski, 2000)(Lincoln, 2011). Yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana ceramah/khutbah pascabanjir Aceh 2025 membingkai penyebab bencana dalam *frame* moralistik religius, serta menelaah implikasi framing itu terhadap pesan kewarganegaraan, terutama terkait tanggung jawab warga dan orientasi tindakan mitigasi bencana serta etika lingkungan. Analisis dilakukan dengan memosisikan pemahaman keagamaan sebagai sesuatu yang perlu kontekstual dan dialogis dengan pengetahuan ekologi/DAS, sejalan dengan paradigma integrasi-interkoneksi dalam studi keislaman. (Amin Abdullah, 2014). Untuk membaca fenomena tersebut, penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen. Studi kepustakaan digunakan untuk menghimpun dan mengkaji literatur ilmiah (buku, artikel jurnal, dokumen resmi, laporan) yang relevan sebagai dasar teori dan konteks; sementara analisis dokumen digunakan untuk membaca teks/rekaman ceramah sebagai objek kajian utama (Zed, 2014).

### **Hasil Penelitian**

Bagian ini memaparkan temuan utama dari analisis ceramah khutbah jum'at pasca banjir di Aceh pada beberapa masjid yang peneliti temui di lapangan. Berikut beberapa hal yang peneliti petakan dalam beberapa sub judul untuk menjawab pembahasan sebagai tujuan dalam pembuatan artikel ini.

### A. Dominasi Framing Moralistik Religius dalam Menjelaskan Sebab Banjir

Hasil pengodean tematik menunjukkan bahwa banyak ceramah/khutbah pascabanjir di beberapa masjid di Aceh. Banjir lebih sering dibingkai sebagai peristiwa bermakna moral-spiritual (muhasabah, taubat, koreksi diri) dibanding sebagai peristiwa ekologis-struktural (kerentanan DAS, tata ruang, degradasi lingkungan, mitigasi). Pola dominan yang muncul adalah relasi sebab-akibat religious, Berikut pola yang dapat tegambarkan.



**Gambar 1.** Pola Framing

Temuan ini tidak banyak terdokumentasi di media massa akan tetapi indikasi memperlihatkan kuatnya penjelasan *moralistic religious* di Aceh pada umumnya khususnya daerah terdampak sebagai rujukan awal dalam memaknai banjir sebagai suatu teguran. Tipologi Frame Keagamaan yang seing sekali terdengar yaitu: Teguran, Ujian, dan Kifarat yang terdapat dalam konteks ceramah/khutbah. Teguran (*moral corrective*), Bencana diposisikan sebagai peringatan/teguran atas kekeliruan dan dosa, lalu solusi yang ditonjolkan adalah taubat dan pembenahan akhlak. Ujian (*spiritual endurance*) Bencana dimaknai sebagai ujian ketetapan Tuhan yang menuntut kesabaran, ketabahan, dan keteguhan iman. Kifarat/Pembersihan (*moral purification*) Bencana dipahami sebagai momen pembersihan dosa sekaligus kesempatan meningkatkan amal sosial (sedekah/infak, membantu korban, gotong royong).

### B. Implikasi Perpindahan Fokus dari Literasi Kebencanaan ke Disiplin Moral

Individualisasi solusi dan melemahnya orientasi mitigasi, secara ilmiah banjir Aceh 2025 dilaporkan oleh BMKG terkait hujan berintensitas tinggi dalam rentang waktu tertentu akan memicu banjir-longsor di sejumlah wilayah di Aceh umumnya (Agi, 2025). Solusi yang ditekankan lebih banyak berupa perbaikan diri (taubat, istighfar, peningkatan ibadah), sementara solusi *public* struktural (pengurangan risiko bencana, peringatan dini, audit tata ruang, rehabilitasi DAS, pengawasan kebijakan lingkungan) kurang menjadi agenda utama yang dibawa

pulang jama'ah sebagai tindakan kewargaan, kesiapsiagaan hanya menjadi latar, bukan inti penjelasan.

Implikasi penting dari framing moralistik religius terlihat pada “model warga ideal” yang diproduksi mimbar. Secara tematik, ceramah pascabanjir banyak menekankan tiga orientasi kewarganegaraan: Kewarganegaraan moral (*moral citizenship*), menjadi warga baik dimaknai sebagai menjadi muslim taat: menjaga ibadah, menghindari maksiat, memperbaiki akhlak. Pesan ini kuat untuk pembentukan etika personal, tetapi berpotensi menyederhanakan kompleksitas bencana. Kewarganegaraan kepatuhan (*obedience-based citizenship*) Dalam beberapa ceramah, pemulihan sosial dikaitkan dengan keteraturan moral dan kepatuhan pada norma sosial-keagamaan. Ini dapat memperkuat kohesi sosial pascabencana, namun juga dapat menggeser perbincangan dari hak dan tanggung jawab warga dalam tata kelola bencana menuju pengawasan moral. Kewarganegaraan kedermawanan (*charity citizenship*) Ajakan sedekah, infak, zakat, gotong royong, dan membantu korban muncul sebagai wujud kepedulian.

Di sini ceramah memberi kontribusi positif yaitu: memobilisasi bantuan, menguatkan solidaritas, dan mempercepat pemulihan komunitas. Akan tetapi, ketika filantropi menjadi respon utama, ada risiko bahwa solusi jangka panjang (mitigasi, kebijakan lingkungan, kesiapsiagaan) tidak menjadi agenda bersama. Dengan demikian, pesan kewarganegaraan pasca banjir cenderung menempatkan warga sebagai subjek moral dan subjek sosial, tetapi belum konsisten menempatkan warga sebagai subjek ekologis dan subjek politik-kebijakan yang berhak menuntut tata kelola risiko bencana yang lebih baik.

Implikasi ini bukan berarti bahasa religius “keliru”, melainkan menunjukkan bahwa tanpa integrasi dengan penjelasan ekologis ilmiah, pesan religius mudah berhenti pada moral personal dan filantropi, bukan pada perubahan perilaku ekologis dan tata kelola risiko.

## **Pembahasan**

Dominasi framing moralistik religius pada khutbah pasca banjir di Aceh tidak dapat dilepaskan dari habitus budaya keagamaan Aceh yang secara historis dikenal sebagai ‘Serambi Mekkah’ serta institusionalisasi syariah yang menjadikan agama sebagai bahasa publik utama. Dalam ruang publik yang kuat dipengaruhi otoritas tafsir keagamaan dan menjadikan masjid sebagai pusat produksi makna sosial, bencana lebih mudah dipahami sebagai teguran/ujian/kifarat yang menuntut taubat, kesabaran, dan amal, dibanding sebagai masalah ekologis-struktural yang menuntut agenda mitigasi dan tata kelola risiko. Dalam kondisi seperti ini, wajar bila khutbah memilih jalur sebab-akibat religius (dosa-teguran-taubat) karena itu adalah frame yang paling masuk akal dan paling mudah diterima jama'ah (Zulkarnaini, Ansor, & Masyhur, 2022).

Pola framing yang tergambar pada hasil penelitian selaras dengan gagasan yang Entman nyatakan bahwa frame menyeleksi aspek realitas tertentu lalu membuatnya lebih “menonjol” untuk mengarahkan definisi masalah, atribusi sebab, evaluasi moral, dan rekomendasi solusiet (Entman, 2006). Dimana terangkat lebih

ke dalam ranah rekonstruksi pribadi dalam ranah spiritual, bila dikaji lebih jauh, padahal dokumen Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan tujuan pelaksanaan syariat mencakup perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup (Alam), sehingga bahasa agama memiliki legitimasi luas untuk mengatur tatanan sosial dan sebetulnya juga ekologis (DPRA dan Gubernur, 2014).

Agama hadir tidak untuk membatasi manusia dalam berfikir dan hanya menerima takdir, akan tetapi agama hadir untuk membawa manusia dapat berfikir kritis akan keadaan yang dialaminya (Junoh, Mohamad, Mustafa Busu, & Mat Jusoh, 2021). Introspeksi diri perlu dilakukan bukan hanya untuk sekedar dalam rutinitas ke agamaan, tetapi dapat dimaknai lebih luas lagi Dimana hal-hal yang dapat dimunculkan lalu diintegrasikan dengan spritiual keagamaan lebih berdampak untuk melahirkan implikasi-implikasi yang positif (Ilmiah-spiritual).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan Framing Moralistik Religius dalam Ceramah Pasca Banjir di Aceh sehingga menghasilkan Pesan Kewarganegaraan bukan hanya mengintegrasikan moral spiritual tetapi juga memunculkan ideologi ilmiah.

1. Melakukan riset banjir secara ilmiah. Bukan untuk “mengganti” bahasa agama, tetapi agar mimbar punya basis fakta tentang mengapa banjir terjadi (curah hujan ekstrem, kapasitas drainase, perubahan tata guna lahan, kerentanan DAS, dll.) dan apa yang bisa dilakukan komunitas. Literatur menekankan bahwa lembaga/komunitas keagamaan efektif bila terhubung dengan pendekatan *community-based disaster risk management* dan kemitraan lintas pemangku kepentingan (Sheikhi, Seyedin, Qanizadeh, & Jahangiri, 2021). Dijaman yang serba canggih ini riset merupakan hal yang mudah sembari menelaah. Salah satu yang peneliti dapatkan dari video yang dipublikasi di media kaberehnews.com yang mewawancarai seseorang mantan pekerja yang berhubungan langsung dilapangan ia mengungkapkan hutan yang sudah gundul di Aceh -+2000 hektar di gunung leuser, -+2000 hektar di peunaron, brayeun -+1500 Hektar, julok -+2000 hektar, -+8000 Aceh utara, merdu -+3000 hektar, aceh Selatan -+3000, tanah gayo -+1500 ini ijin dalam dua tahun kebelakang dengan alasan pengembangan daerah tuturnya.
2. Menyusun materi khutbah integratif. memakai konsep khalifah/amanah (tanggung jawab menjaga bumi), mizan (keseimbangan), dan masalah (kepentingan publik) sebagai jembatan teologis menuju literasi ekologis dan kebijakan mitigasi. Riset ekoteologi/etika lingkungan Islam menegaskan bahwa ajaran Islam menyediakan kerangka moral-spiritual yang relevan untuk kesadaran ekologis dan praktik/policy keberlanjutan (Natrissia Hutagalung, 2024).
3. Pelatihan singkat komunikasi risiko. Kajian literatur menunjukkan keyakinan agama memengaruhi cara orang menafsir bahaya, menilai risiko, dan berperilaku saat bencana artinya mimbar sangat strategis untuk memperbaiki kesiapsiagaan jika diberi konten tindakan yang jelas (Sun, Deng, & Qi, 2018). Studi di Aceh juga menemukan pemuka agama dipandang kredibel dan dipercaya, dan mereka receptive untuk menyampaikan pesan mitigasi guna

memperkuat resiliensi komunitas(Wardhana, Rahman, Oktari, & Nishi, 2023). *Systematic review* tentang peran institusi keagamaan dalam manajemen bencana menekankan pentingnya: kolaborasi dengan stakeholder, kesatuan informasi & pesan, kesiapsiagaan institusi, dan fungsi shelter/dukungan komunitas(Sheikhi et al., 2021).

4. Memposisikan masjid sebagai pusat kesiapsiagaan komunitas bukan hanya pusat pemulihan spiritual. Penelitian di Banda Aceh merekomendasikan integrasi konsep masjid yang bisa mengakomodasi aktivitas ibadah sekaligus fungsi evakuasi darurat risiko bencana, karena keterikatan sosial pada masjid tinggi dan efektif untuk mobilisasi perilaku(Vivita, Husaini, Anggraini, & Dewi, 2023).

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti ingin menyampaikan bahwasanya saat ada bencan seperti banjir bandang di Aceh mimbar merupakan salah satu hal yang sangat efektif untuk mencerdaskan umat melihat lebih dalam (kritis) apa yang terjadi sebenarnya, sehingga terjadi hal yang sedemikian rupa setelah penjelasan ilmiah barulah diintegrasikan dengan muhasabah diri dengan moral personal amupun umat muslim secara umumnya, masjid bukan hanya untuk memulihkan spiritual tetapi dapat memandang berbagaihal lini dari kehidupan manusia.

Sebagai ilustrasi saat terjadinya kebakaran (ia memposisikan pemadam sebagai Allah dan api sebagai bencana) Denni Pinontoan mengatakan bahwa ketika terjadi kebakaran, suatu tindakan yang sangat keliru jika kita menyalahkan pemadam kebakaran sebagai oknum yang bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran (padahal mereka hanya bertugas untuk menolong anda dan membuat situasi menjadi stabil kembali), tanpa kemudian bertanya kepada diri sendiri mengapa rumah kita bisa terbakar, mungkin korsleting listrik, lupa mematikan kompor dan sebagainya. Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa jangan terlalu cepat menjudge Allah sebagai yang kasar dan penghukum karena sesungguhnya manusia memiliki keterbatasan yang bisa saja berujung pada kekeliruan. 00 Sama halnya seperti permasalahan yang diangkat Dimana kita selalu menyalahkan Allah menghukum kita atas dosa spiritual yang kita lupakan diwaktu tertentu sehingga mendatangkan bencana. Kita luput dengan bukti yang ditampakkan dunia bahwa Indonesia berada di peringkat ke 2 dari dua dekade terakhir dengan kehilangan hutan primer 10,7 juta, seperti gambar dibawah ini.

**Top 10 countries for humid tropical primary forest loss, 2002-2024**

Country	Humid tropical primary forest loss, 2002-24 (million hectares)	Humid tropical primary forest extent, 2002 (million hectares)
Brazil	33.5	343.1
Indonesia	10.7	93.8
Democratic Republic of the Congo	7.4	104.6
Bolivia	5.7	40.8
Malaysia	3	15.9
Peru	2.8	69.1
Colombia	2.1	54.8
Cambodia	1.5	4.3
Laos	1.3	8.3
Paraguay	1.2	3.5

 WORLD RESOURCES INSTITUTE

**Gambar 2.** Global Forest Watch

Sebagian besar dari data tersebut berada di wilayah Sumatra. Beberapa tambahan Implikasi akan muncul, Ketika pengetahuan ilmiah di integrasikan dengan spiritual, maka akan terlihat efektif. Dimana manusia diajak lebih peka terhadap alam sehingga suara dan tindakan yang hadir akan memperluas informasi serta dengan semangat Bersama dapat lebih peka melihat alam yang dekat maupun jauh dari pandangan. Dengan integrasi tersebut maka akan lahir beberapa hal yaitu:

1. Kepekaan Ekologis Meningkat

Manusia pada umumnya akan lebih peka terhadap tanda kerusakan alam, Jika khutbah menautkan amanah menjaga bumi ada beberapa ayat yang mendukung hal tersebut salah satunya Surat Ar-Rum ayat 41 (Agus, 2025a) dipadukan dengan penjelasan ilmiah bahwa deforestasi/kerusakan hulu memperbesar limpasan dan memperparah banjir, warga cenderung lebih peka terhadap indikasi perusakan (misalnya. Angkutan kayu ilegal), lalu terdorong melakukan kontrol sosial/ pelaporan. Landasan teologis untuk tanggung jawab ekologis ini kuat dalam kajian etika lingkungan Islam dengan membangun sikap ini maka mengunyah rasa cinta terhadap tanahnya sebagai warga negara yang baik.

2. Dari pasrah ke mitigasi, spiritualitas menjadi energi untuk tindakan pencegahan (Fatimahsyam, 2024)

3. Informasi kebencanaan menyebar lebih luas karena mimbar punya kepercayaan sosial tinggi, ketika khutbah memasukkan penjelasan ilmiah yang sederhana (misalnya. hubungan hujan ekstrem–drainase–alih fungsi lahan), jamaah membawa pulang narasi yang bisa diulang ke keluarga/tetangga, sehingga literasi risiko meluas. Sehingga Aceh dapat tersorot oleh nasional bahkan dunia karena kepekaan setiap orang telah dibangun dan berani bersuara, membagikan posingan di sosial media masing-masing, tidak takut kepada ancaman karena bukan hanya sendirian tetapi gerakan yang ramai disuarakan dengan satu suara maka bencana akan terlihat dan Aceh segera pulih dari segala ini, karena budaya di Indonesia no viral no justice (Fitriani, 2025).

4. Kontrol sosial terhadap pembabatan dan kebakaran hutan makin kuat (bukan cuma sedih, tapi bergerak) dalam mengawasi aktivitas pembakaran lahan, menekan praktik pembukaan lahan yang merusak, mendorong aturan lokal (gampong) untuk perlindungan kawasan rentan karena mengetahui akibat yang akan dibayar banjir bandang, longsor, hilangnya resapan, krisis air dan lain-lain.
5. Gerakan ekoteologi digalakkan (tanam pohon/rehabilitasi) menjadi respons jangka panjang, lintas generasi. Ketika khutbah menempatkan penanaman pohon sebagai amal jariyah ekologis (spiritual) sekaligus intervensi ilmiah (rehabilitasi resapan, stabilisasi tanah, pemulihan DAS), warga lebih mudah menerima bahwa aksi lingkungan adalah bagian dari ibadah dan kewarganegaraan (Fitria, Fitriani, Fikra, & Darmalaksana, 2025).

Berkenaan implikasi positif yang telah dipaparkan akan hadir apabila, framing yang diangkat di atas mimbar berkenaan sikap manusia dalam perbuatannya terhadap alam bukan perbuatan manusia karena ibadahnya (sholat, sedekah dan lain-lain). Dengan membangun kecerdasan warga negara maka sikap kewarganegaraan seperti cinta terhadap tanah airnya semakin meningkat dengan hadirnya kepekaan terhadap lingkungan (alam yang dekat dan yang jauh) sehingga para penguasa akan lebih menimbang saat melakukan deforestasi karena warga negara telah bersatu dalam kesatuan untuk menjaga alam bersama.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ceramah dan khutbah pascabanjir Aceh 2025 lebih banyak meringkaskan bencana melalui moralistik religius. Banjir dipahami sebagai teguran ujian atau kufarat sehingga respons utama yang ditawarkan adalah taubat kesabaran pembenahan akhlak dan amal sosial. Kerangka ini terbukti kuat karena sesuai dengan habitus keagamaan Aceh dan posisi mimbar sebagai ruang produksi makna yang dipercaya masyarakat.

Secara kritis temuan ini memperlihatkan masalah ketika kerangka moralistik menjadi penjelasan utama dan hampir tunggal. Ia cenderung menyederhanakan kompleksitas banjir dan menggeser pusat persoalan dari relasi manusia dengan lingkungan dan tata kelola menuju relasi individu dengan dosa dan pahala. Akibatnya solusi ikut terindividualisasi. Warga didorong menjadi subjek moral dan subjek sosial yang patuh serta dermawan tetapi tidak konsisten didorong menjadi subjek ekologis dan subjek kebijakan yang bertanya siapa merusak siapa mengizinkan siapa lalai siapa harus bertanggung jawab. Dalam kondisi demikian moralitas mudah berubah menjadi pengawasan perilaku warga sementara persoalan struktural seperti kerusakan hutan tata ruang pengelolaan DAS dan akuntabilitas pemerintah atau pelaku usaha tidak menjadi agenda publik yang kuat. Kerangka ini juga berisiko melahirkan penerimaan pasrah yang menormalisasi bencana sebagai sesuatu yang selalu datang kembali tanpa koreksi serius pada sumber kerentanan.

Karena itu kontribusi utama artikel ini adalah menegaskan bahwa bahasa agama seharusnya tidak berhenti pada muhasabah dan filantropi. Bahasa agama

justru perlu dipakai untuk membuka nalar kritis dan menggerakkan tindakan mitigasi yang nyata. Integrasi penjelasan ilmiah sederhana tentang sebab banjir dengan etika lingkungan Islam dapat mengubah energi spiritual menjadi tanggung jawab ekologis dan kewarganegaraan aktif. Mimbar dapat mendorong warga untuk menjaga alam melakukan kontrol sosial terhadap perusakan memperkuat kesiapsiagaan komunitas serta menuntut kebijakan yang melindungi kawasan rentan. Masjid juga dapat diposisikan sebagai pusat literasi risiko dan pusat kesiapsiagaan bukan hanya ruang pemulihan batin.

### Daftar Pustaka

- Abdul Muhari. (2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Retrieved January 29, 2026, from [bnpb.go.id](https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-28-november-2025) website: <https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-28-november-2025>
- Agi. (2025). Distribusi Curah Hujan Aceh 21–27 November 2025 - Stasiun Klimatologi Aceh. Retrieved January 30, 2026, from [bmkg](https://staklim-aceh.bmkg.go.id/distribusi-curah-hujan-aceh-21-27-november-2025/) website: <https://staklim-aceh.bmkg.go.id/distribusi-curah-hujan-aceh-21-27-november-2025/>
- Agus. (2025a). 15 Ayat Al-Qur'an yang Mengandung Larangan Melakukan Kerusakan di Muka Bumi – UINSI Samarinda. Retrieved January 30, 2026, from [uinsi.ac.id](https://www.uinsi.ac.id) website: <https://www.uinsi.ac.id/2025/01/15/15-ayat-al-quran-yang-mengandung-larangan-melakukan-kerusakan-di-muka-bumi/>
- Agus. (2025b). Banjir Rendam 9 Daerah di Aceh, 1.497 Warga Mengungsi. Retrieved January 29, 2026, from [Detik.com](https://www.detik.com/sumut/berita/d-8230206/banjir-rendam-9-daerah-di-aceh-1-497-warga-mengungsi) website: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8230206/banjir-rendam-9-daerah-di-aceh-1-497-warga-mengungsi>
- Amin Abdullah, M. (2014). Religion, science and culture: An integrated, interconnected paradigm of science. *Al-Jami'ah*, 52(1), 175–203. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>
- Antara. (2025). Situasi terkini desa yang hilang akibat banjir bandang di Aceh Tamiang - ANTARA News. Retrieved January 29, 2026, from [Antaraneews](https://www.antaraneews.com/foto/5373954/situasi-terkini-desa-yang-hilang-akibat-banjir-bandang-di-aceh-tamiang) website: <https://www.antaraneews.com/foto/5373954/situasi-terkini-desa-yang-hilang-akibat-banjir-bandang-di-aceh-tamiang>
- DPRA dan Gubernur. (2014). Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Retrieved January 30, 2026, from [https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun\\_aceh\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2014\\_tentang\\_pokok-pokok\\_syariat\\_islam1.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_8_tahun_2014_tentang_pokok-pokok_syariat_islam1.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Entman, R. M. (2006). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fatimahsyam, F. (2024). Islam and Disaster Risk Reduction: The Role of Local Religious Leaders in Transforming Communities in Gampong Deah Glumpang, Banda Aceh. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 77–86. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v3i2.6144>

- Fitria, F., Fitriani, Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2025). Sosialisasi Gerakan Menanam 1 Juta Pohon Matoadi Indonesia. *Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>*, 51, 16–23.
- Fitriani, N. (2025). Legal Analysis of the Phenomenon of “No Viral No Justice”: in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia. *Ultimate Journal of Legal Studies*, 3(1), 167–172. <https://doi.org/10.32734/uljls.v3i1.19642>
- Junaidi Hanafiah. (2025). Aceh Banjir, Akumulasi Kerusakan Hutan? Retrieved January 29, 2026, from [mongabay.co.id](https://mongabay.co.id) website: <https://mongabay.co.id/2025/11/29/aceh-banjir-akumulasi-kerusakan-hutan/>
- Junoh, N., Mohamad, A. M., Mustafa Busu, Z., & Mat Jusoh, N. A. (2021). Islamic Critical Thinking: An Analysis of Its Significance Based on The Al-Quran and Scholarly Views. *‘Abqari Journal*, 25(1), 33–48. <https://doi.org/10.33102/abqari.vol24no2.377>
- Lincoln, N. K. D. dan Y. S. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Natrisia Hutagalung, N. (2024). Islam and the Environment: A Conceptual Analysis Based on the Qur’an and Hadith. *Muqaddimah: Jurnal Studi Islam*, 15(5), 18–31. <https://doi.org/10.71247/r0jk0s98>
- Nazaruddin, M. (2024). Religious modeling of a natural disaster: a cultural semiotic study. *Chinese Semiotic Studies*, 20(1), 187–209. <https://doi.org/10.1515/css-2024-2011>
- Sandelowski, M. (2000). Focus on research methods: Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing and Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240x\(200008\)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g](https://doi.org/10.1002/1098-240x(200008)23:4<334::aid-nur9>3.0.co;2-g)
- Sheikhi, R. A., Seyedin, H., Qanizadeh, G., & Jahangiri, K. (2021). Role of Religious Institutions in Disaster Risk Management: A Systematic Review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 15(2), 239–254. <https://doi.org/10.1017/dmp.2019.145>
- Sun, L., Deng, Y., & Qi, W. (2018). Two impact pathways from religious belief to public disaster response: Findings from a literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 27, 588–595. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2017.10.004>
- Vivita, L., Husaini, Anggraini, R., & Dewi, C. (2023). Enhancement of disaster preparedness: Approaches of place attachment and behavior to “build back better” mosque as tsunami evacuation building in Banda Aceh City, Indonesia. *Progress in Disaster Science*, 19, 100293. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100293>
- Wardhana, M. R. S., Rahman, A., Oktari, R. S., & Nishi, Y. (2023). Role of religious leaders as disaster risk communicators: a study in Peukan Bada District-Aceh. *E3S Web of Conferences*, 464, 09004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346409004>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan (III)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia.

Zulkarnaini, Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2022). Sharia in power: non-Muslims and the performance of Islamic politics in Aceh public sphere, Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 257–283. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.257-283>